

# L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2015

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBRANA



KONTRIBUSI  
LAKIP UNTUK  
KABUPATEN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Hyang Widi Wasa karena atas karunianya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sisten Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) ini telah mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah , dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana tahun 2015 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya

Selanjutnya Rencana Strategis (RENSTRA) dipakai acuan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahun 2015 ini dapat dipakai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2015. LKjIP merupakan penilaian evaluasi atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang baik di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) maupun didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Besar harapan kami agar LKjIP ini dapat diterima sebagai pertanggung jawaban Kinerja, sekaligus sebagai evaluasi untuk peningkatan **LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015**

Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana di masa – masa mendatang.

Kami sampaikan ucapan terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini, semoga Ida Sanghyang Widhi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Negara, 25 Mei 2016  
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Jembrana,

**I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640506 199403 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBRANA**

Jln Surapati Nomor 1 Telp. ( 0365 ) 41210 NEGARA

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBRANA**

**Nomor : 09 /HUBKOMINFO/2016**

**TENTANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas HUBKOMINFO Kabupaten Jemberana Tahun 2015.

**Mengingat** :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang selanjutnya disebut dengan LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Laporan tentang hasil capaian kinerja dari Dinas, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana atas pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jembrana tahun 2015 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

2.....

2. LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 dan Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016.
3. LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **Pasal 2**

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana (SKPD) menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategik pada tahun 2015.

## **Pasal 3**

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana menjadi :

- a. Umpan balik dalam Perencanaan Strategik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
- b. Umpan balik bagi Bidang dan Sekretariat, JF maupun staf dalam menyusun Perencanaan Strategik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana,

## **Pasal 4**

Bidang dan Sekretariat, JF maupun staf menyusun Laporan pelaksanaan tugas untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan yang telah dicapai pada tahun 2015 dan selanjutnya dituangkan dalam LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Perhubungan Kabupaten Jembrana Tahun berikutnya .

## **Pasal 5**

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .

Pasal 6.....

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 25 Mei 2016  
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi  
dan Informatika  
Kabupaten Jembrana

**I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, SH. M.Si**

Pembina Utama Muda .  
NIP. 19640506 199403 1 010



## D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR BAGAN .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vi
<b>BAB I      P E N D A H U L U A N</b>	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
1.3 ISU-ISU STRATEGIS .....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
<b>BAB II      P E R E N C A N A A N K I N E R J A</b>	
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	8
2.2 PENETAPAN KINERJA.....	17
<b>BAB III     A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A</b>	
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	18
3.2 ASPEK KEUANGAAN.....	34
3.4 PRESTASI ATAU PENGHARGAAN.....	43
<b>BAB IV     P E N U T U P</b> .....	44

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 DATA ASET YANG DIMILIKI.....	6
TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	12
TABEL 2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	15
TABEL 2.3 PENETAPAN KINERJA .....	17
TABEL 3.1 INDIKATOR SASARAN .....	18
TABEL 3.2 SASARAN MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS.....	19
TABEL 3.3 SASARAN MENINGKATNYA MINAT MASYARAKAT PENGGUNA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM .....	23
TABEL 3.4 SASARAN MENINGKATNYA KELANCARAN LALU LINTAS.....	26
TABEL 3.5 SASARAN MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	28
TABEL 3.6 SASARAN MENINGKATNYA KETERSEDIAAN APLIKASI PELAYANAN PUBLIK .....	30
TABEL 3.7 DATA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2015 .....	33
TABEL 3.8 CAPAIAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 DAN TAHUN SEBELUMNYA (2014).....	36

**DAFTAR BAGAN**

BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....5

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) merupakan sebuah media pertanggung jawaban yang mengacu pada perpres 29 tahun 2014, yang menghendaki agar setiap instansi pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama 1 ( satu ) tahun . Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama tahun 2015 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, Program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan.

Berdasarkan pada perpres nomor 29 tahun 2014 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Melalui Perpres nomor 29 tahun 2014 Birokrasi baru mampu melaksanakan Akuntabilitas dan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Sistem AKIP )

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintah berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil ( Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment “ oleh masing – masing instansi pemerintah yaitu instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/ mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintah berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis kearah system yang

bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintah yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan- masukan ( inputs oriented accountability ) dan proses kearah akuntabilitas pada hasil ( result oriented accountability ) terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan manajemen pemerintah adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang bisa diakses oleh seluruh *stakeholders*.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya telah menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian pula Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu instansi pemerintah telah juga menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan kedalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana tahun 2015.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah: Terwujudnya pelayanan publik yang prima di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dilandasi dengan pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah: tersedianya sarana transportasi yang berkualitas dan terjangkau, terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan sarana transportasi, meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas, meningkatnya pelayanan pengujian

kendaraan bermotor, meningkatnya pemahaman aparaturnya pemerintah terhadap hak untuk mendapatkan informasi, terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media sosialisasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dibandingkan dengan target capaian yang diharapkan, serta hambatan yang ditemui sehingga suatu target belum tercapai selama tahun berjalan. Dimana diuraikan mengenai penjelasan alokasi dana untuk 7 ( TUJUH ) program dengan 21 ( DUA PULUH SATU) kegiatan. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 terdapat dukungan dana sejumlah Rp. 9.613.669.150,- yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.4.564.784.500,- dan alokasi belanja langsung sebesar Rp.5.048.884.650,-. Bila dibandingkan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung maka sebagian besar dana APBD untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dialokasikan untuk belanja langsung.

Realisasi belanja tahun 2015 sebesar yang terbagi dalam dua jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.359.097.060, sisa dana sebesar Rp 205.687.440,- dengan persentase realisasi sebesar 95,49 % dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.503.585.020,-,sisa dana Rp 545.299.630,- dengan persentase realisasi sebesar 89,19%. Total realisasi belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 8.862.682.080,- (92,19%). Sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 750.987.070,- (7,81%).

Dalam hal peningkatan kinerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 terdapat beberapa kendala yang

dihadapi yaitu dalam bidang perhubungan berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai di bidang perhubungan, kurangnya sarana dan prasarana perhubungan hingga kurang tertib dan sadarnya masyarakat akan berlalu lintas dan mengurus perijinan kendaraan bermotor yang dimilikinya. Sedangkan dalam bidang komunikasi dan informatika terdapat kendala seperti terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai tenaga teknis infokom, , kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodasi kelancaran tugas yang berhubungan dengan komunikasi dan informatika.

Untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka dilakukan beberapa hal seperti memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien, menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat, secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan, menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi dengan baik serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara efektif. Dengan demikian diharapkan dapat mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi pada tahun berikutnya.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember selama Tahun 2015, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang bisa diakses luas oleh masyarakat.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki arti dan peranan sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja maupun membangun sistem manajemen kerja yang lebih baik untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana
2. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
3. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam menjalankan pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dalam tugas dan fungsinya;
4. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana;
5. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
6. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian system perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika periode 2011-2016. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi serta realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dinas;
2. Penyusunan rencana strategis dinas;
3. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

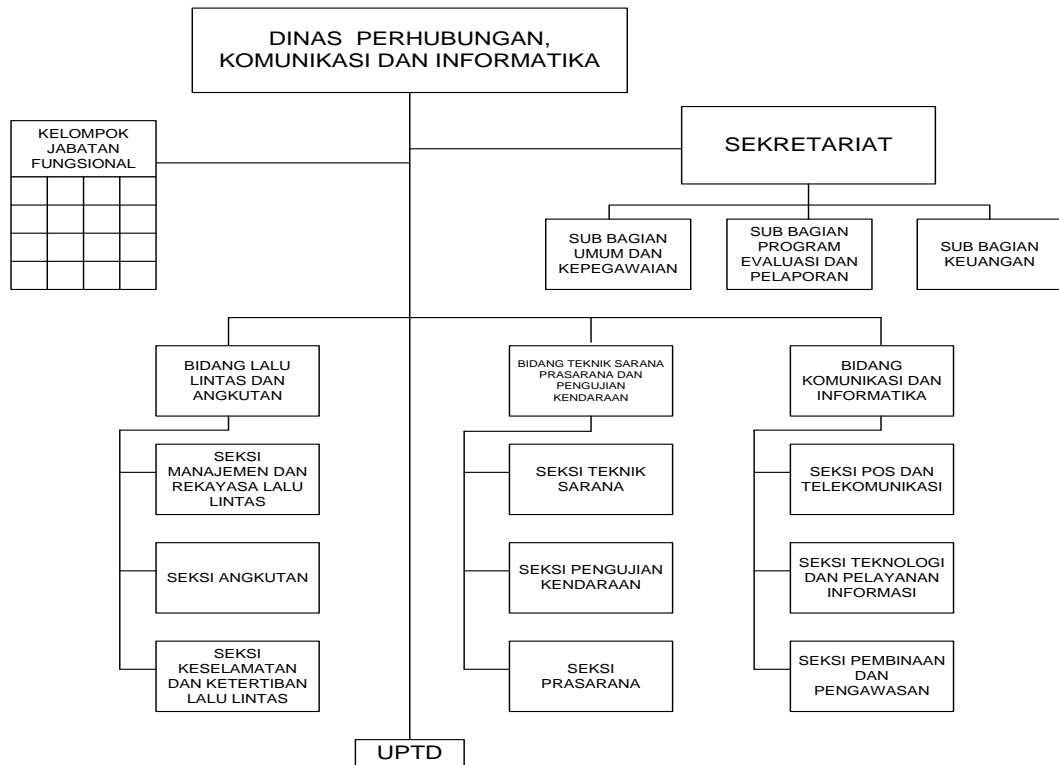
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok: melaksanakan urusan berdasarkan azas otonomi pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
  - c) Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Teknik Sarana, Pengujian Kendaraan, dan Prasarana, membawahi :
  - a) Kasi Teknik Sarana
  - b) Kasi Pengujian Kendaraan
  - c) Kasi Prasarana

3. Bidang Lalu Lintas Angkutan, membawahi :
  - a) Kasi Angkutan
  - b) Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
  - c) Kasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas
4. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
  - a) Kasi Teknologi dan Pelayanan Informasi
  - b) Kasi Pos dan Telekomunikasi
  - c) Kasi Pembinaan dan Pengawasan

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Dinas Hubkominfo dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**BAGAN 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



*Sumber : Perbub Kabupaten Jembrana Nomor 55 Tahun 2011*

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut :

- (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- (2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- (3) Landasan Operasional :

Dengan pembagian tugas dan pengaturan organisasi sesuai struktur di atas, maka fungsi pelayanan dan pemerintahan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dapat berjalan dengan baik, dan didukung oleh aparatur yang memadai. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2015 terdapat 63 orang pegawai, dengan status pegawai negeri sipil. Gambaran tingkat pendidikan aparatur adalah sebagai berikut : Strata 2 (S2) sebanyak 4 orang ; Strata 1 (S1) sebanyak

34orang; SMA sebanyak 22orang; SMP sebanyak 2 orang; dan SD sebanyak 1orang.Dilihat dari tingkat kepangkatan dan golongan kepegawaian, terdapat 4 orang aparatur dalam golongan IV; sebanyak 45 orang dalam golongan III; sebanyak 13 orang dalam golongan II; 1 orang dalam golongan I.

Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat direalisasikan tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai serta kualitas dan kuantitas. Adapun fasilitas yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang tercatat sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

**TABEL 1.1**  
**DATA ASET YANG DIMILIKI**

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Tanah	Rp.9.524.680.00	Rp 8.548.680.000	Rp 8.548.680.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp.11.676.361.875,-	Rp 5.911.986.443	Rp 6.156.969.915
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 8.721.823.993,-	Rp 9.552.451.893	Rp 11.144.155.293
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 436.613.000,-	Rp 483.677.000	Rp 609.290.000
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 113.992.800,-	Rp 113.992.800	Rp 2.695.000
6	Aset Lainnya/Rusak berat	-	Rp 6.962.303.532	Rp 4.725.802.600
7	Persediaan	-	Rp 33.254.075	Rp 80.910.900
<b>Total</b>		Rp. 30.473.471.668	Rp. 31.606.345.743	Rp 31.526.167.366

*Sumber data: Sekretariat Dinas Perhubungan 2015*

### 1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Untuk tercapainya pelaksanaan tujuan, diperlukan strategi yang merupakan serangkaian manuver dan seluruh elemen sebagai serangkaian arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan

lingkungan yang berubah untuk memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan/*stakeholder* (Wikipedia). Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember diantaranya:

1. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jember
2. Prasarana dan fasilitas angkutan umum kurang memadai
3. Belum optimalnya pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di kabupaten jember
4. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik
5. Kurang tersedianya Sistem aplikasi system pelayanan publik yang memadai

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1 Gambaran Umum SKPD

#### 1.2 Tugas dan Fungsi SKPD

#### 1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD

#### 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

#### 2.1 Perencanaan Strategis

#### 2.2 Perencanaan Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS & KINERJA &**

#### 3.1 Pengukuran Kinerja

#### 3.2 Analisis Kinerja

#### 3.3 Aspek Keuangan

#### 3.4 Prestasi atau Penghargaan

### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Jember di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pembangunan kemampuan ilmu dan teknologi untuk mewujudkan daya saing global serta penguatan daya perekonomian. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016 dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Nomor 21a/HUBKOMINFO/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016.

Adapun rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagai berikut :

### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 55 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Masing-masing tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan tersebut berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

#### A. Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh



Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika ditetapkan **Visi** yaitu :

**“ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang Dilandasi dengan Pemberdayaan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia”**

Visi tersebut mengandung 3 (tiga) pengertian penting yaitu Pelayanan Publik, Pelayanan Prima dan SDM.

1. Pelayanan Publik mengandung pengertian segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan Prima (*Service Excellence*) yang dimaksud adalah pelayanan yang menggunakan pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik dan ada tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standard layanan tertentu (Swastika 2:2005). Sehingga **Pelayanan Publik yang Prima** mengacu kepada Pelayanan barang dan jasa publik yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan mengacu kepada standar minimal pelayanan, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk menciptakan pelayan masyarakat yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai yang diharapkan.

## **B. Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Dari Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tersebut , dijabarkan misi sebagai petunjuk garis besar dalam

menjalankan visi organisasi. Adapun Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sarana transportasi yang efektif dan efisien sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat.

Untuk mewujudkan sarana transportasi yang efektif dan efisien diperlukan penataan tertib berlalu lintas sehingga menjamin keamanan, kenyamanan, serta menopang kelancaran dinamika pembangunan dan sebagai urat nadi kelancaran kehidupan ekonomi, sosial budaya.

- 2) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan keselamatan dalam lalu lintas, diperlukan dukungan sarana prasarana, berupa rambu lalu lintas, marka jalan, dan kondisi kendaraan yang laik pakai.

- 3) Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, dibutuhkan optimalisasi penyebaran informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, berupa media cetak, elektronik dan digital.

- 4) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan pendayagunaan informasi komunikasi secara optimal, dilakukan secara terkoordinasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang terpadu, dinamis, dan terkoordinasi.

### **C. Tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi organisasi. Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu atau kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah visi dan misi. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas

2. Meningkatkan Minat masyarakat pengguna angkutan umum
3. Meningkatkan kelancaran lalu lintas
4. Meningkatkan keterbukaan Informasi Publik.
5. Meningkatkan ketersediaan aplikasi pelayanan publik

#### **D. Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Sasaran merupakan gambaran dari apa yang hendak dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran ini merupakan tuangan spesifik atas apa yang hendak dicapai sebagai titik fokus dalam pencapaian tujuan yang nantinya akan mengarah pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diukur.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah:

1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
2. Meningkatnya minat masyarakat pengguna angkutan penumpang umum
3. Meningkatnya kelancaran lalu lintas
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
5. Meningkatnya ketersediaan aplikasi pelayanan publik

#### **E. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi masyarakat dan stakeholder yang terdiri atas indikator output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 2.1  
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja outcome	Satuan	Indikator Kinerja output	Target
1	2	3	4	5	6
1	1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1.1 Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	1.1 Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	94,75
		1.2 Persentase kendaraan laik jalan	%	1.2 Persentase kendaraan laik jalan	100
		1.3 Persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan	%	1.3 Persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan	100
2	Meningkatnya minat masyarakat pengguna angkutan penumpang umum	2.1 Persentase loadfactor kendaraan	%	2.1 Persentase loadfactor kendaraan	40
		2.2 Persentase kelengkapan terminal	%	2.2 Persentase kelengkapan terminal	100
		2.3 Persentase kendaraan angkutan penumpang umum yang memenuhi standar	%	2.3 Persentase kendaraan angkutan penumpang umum yang memenuhi standar	97
		2.4 Persentase halte yang memadai	%	2.4 Persentase halte yang memadai	100
		2.5 Rasio Ijin Trayek	%	2.5 Rasio Ijin Trayek	100
3	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	3.1 Persentase tingkat kemacetan	%	3.1 Persentase tingkat kemacetan	12.6
4	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	4.1 Persentase tingkat masyarakat yang mendapat informasi	%	4.1 Persentase masyarakat yang mendapat informasi	100
5	Meningkatnya ketersediaan aplikasi pelayanan publik	5.1 Persentase sistem informasi pelayanan publik	%	5.1 Persentase sistem informasi pelayanan publik	100

## F. Kebijakan

Setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana kebijakan tersebut merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Kepala Daerah yang dijadikan pedoman dan petunjuk pengambilan kebijakan bagi setiap pimpinan

Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dalam rangka mendukung kebijakan Bupati Jembrana yaitu:

1. Konsistensi pemerintah dalam peyediaan layanan di sektor perhubungan
2. Konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas
3. Konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kenyamanan pengguna fasilitas perhubungan
4. Konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik
5. Konsistensi pemerintah dalam mewujudkan pemanfaatan TIK

### **G. Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Adapun program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana pada Tahun 2015 yang menjadi program pilihan, dan menjadi indikator utama yaitu :

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
7. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

### **H. Kegiatan**

Adapun kegiatanstrategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Jembrana pada anggaran Tahun 2015 yaitu :

1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
2. Rehabilitasi/pemeliharaan *traffic light* dan *warning light*;
3. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
4. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan Terminal;
5. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah;
6. Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan;
7. Fasilitasi perijinan di Bidang Perhubungan;
8. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
9. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juri mudi/awak kendaraan angkutan teladan;
10. Peringatan Hari Perhubungan Nasional ( HARHUBNAS )
11. Pembangunan gedung terminal
12. Pembangunan Halte bus, Taxi, Gedung terminal
13. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
14. Pengadaan marka jalan;
15. Pengadaan Pengendali Isyarat Lalu Lintas
16. Peningkatan Kebutuhan, Pemeliharaan dan Pengawasan Fasilitas Lalu lintas.
17. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
18. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi;
19. Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah;
20. Pengkajian dan Penelitian bidang bidang Informasi dan Komunikasi
21. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Berikut tabel visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

**TABEL 2.2**  
**RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN**  
**INFORMATIKA**

URAIAN	RENSTRA DINAS
VISI	Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang di landasi dengan pemberdayaan dan peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
MISI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan sarana transportasi yang efektif dan efisien sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta pelayanan pengujian kendaraan bermotor</li> <li>3. Mewujudkan keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</li> </ol>
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas</li> <li>2. Meningkatkan minat masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan kelancaran lalu lintas</li> <li>4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik</li> <li>5. Meningkatkan ketersediaan aplikasi pelayanan publik</li> </ol>
SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas</li> <li>2. Meningkatnya minat masyarakat pengguna angkutan penumpang umum</li> <li>3. Meningkatnya kelancaran lalu lintas</li> <li>4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik</li> <li>5. Meningkatnya ketersediaan aplikasi pelayanan publik</li> </ol>
INDIKATOR SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas</li> <li>1.2 Persentase kendaraan laik jalan</li> <li>1.3 Persentase pemasangan fasilitas pemasangan fasilitas perlengkapan jalan</li> <li>2.1 Persentase loadfactor kendaraan</li> <li>2.2 Persentase kelengkapan terminal</li> <li>2.3 Persentase kendaraan angkutan penumpang umum yang memenuhi standar</li> <li>2.4 Persentase halte yang memadai</li> </ol>

2.5 Rasio Ijin Trayek
3.1 Persentase tingkat kemacetan
4.1 Persentase tingkat masyarakat yang mendapat informasi
5.1 Persentase sistem informasi pelayanan publik



## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil maka perlu adanya Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang merupakan Ikhtisar Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015, sebagai berikut:

Berikut Tabel Perjanjian Kinerja Kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

**TABEL 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Perhubungan,**  
**Komunikasi dan Informatika Tahun 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1.1 Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	100
	1.2 Persentase kendaraan laik jalan	100
	1.3 Persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan	100
2. Meningkatnya minat masyarakat pengguna angkutan penumpang umum	2.1 Persentase loadfactor kendaraan	40
	2.2 Persentase kelengkapan terminal	100
	2.3 Persentase kendaraan angkutan penumpang umum yang memenuhi standar	97
	2.4 Persentase halte yang memadai	100
	2.5 Rasio Ijin Trayek	100
3. Meningkatnya kelancaran lalu lintas	3.1 Persentase tingkat kemacetan	12,6
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik	4.1 Persentase tingkat masyarakat yang mendapat informasi	100
5. Meningkatnya ketersediaan aplikasi pelayanan publik	5.1 Persentase sistem informasi pelayanan publik	100

Sumber : Data Sekretariat 2015

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kegiatan ini digunakan rumus :

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran hasil kerja yang menyatakan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, evaluasi terhadap pencapaian penurunan komponen kejadian dinyatakan dengan rumus :

$$\text{Menurunnya kecelakaan lalin} = \frac{\text{jumlah angka kecelakaan lalin tahun (n)}}{\text{jumlah angka kecelakaan Lalin tahun (n-1)}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi **Input** (masukan), **Output** (keluaran), **Outcomes** (hasil), **Benefits** (manfaat) dan **Impacts** (dampak) dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibanding dengan realisasi kegiatan yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Jembrana dengan indikator : **Input** (masukan), **Output** (keluaran), **Outcomes** (hasil).

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja outcome dan output dapat disimpulkan bahwa nilai capaian tujuan sasaran strategis Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.1  
INDIKATOR SASARAN**

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	Capaian Strategis (%)
T1	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	S1.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	87,58
T2	Meningkatkan minat masyarakat pengguna angkutan penumpang umum	S2.	Meningkatnya minat masyarakat pengguna angkutan penumpang umum	81,105
T3	Meningkatkan kelancaran lalu lintas	S1.	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	69,84
T4	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	S2.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	171,9
T5	Meningkatkan ketersediaan aplikasi pelayanan publik	S1.	Meningkatnya ketersediaan aplikasi pelayanan publik	100

### 3.2 ANALISIS KINERJA

LAKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jembrana. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana melakukan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 Sasaran Strategis, 11 Indikator Kegiatan Utama dari 7 program yang dicanangkan. Uraian capaian tujuan sasaran strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Tujuan I : Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas

Keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) sasaran strategis yaitu: menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.

Untuk merealisasikan sasaran strategis menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jembrana dalam perjanjian kinerja 2015 ditetapkan dengan 3 (tiga) indikator yaitu

1. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas dengan target 92 %
2. Persentase kendaraan laik jalan dengan target 100 %
3. Persentase pemasangan fasilitasperengkapan jalan dengan target 100%

Capaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah **rata-rata sebesar 100% dari target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**. Untuk lebih jelasnya capaian sasaran strategis tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.2

## SASARAN MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1.1 Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	140	132	94	150	137	91	150	139	92
	1.2 Persentase kendaraan laik jalan	%	100	95.36	95.36	100	87.83	87.83	100	81,61	81,61
	1.3 Persentase Pemasangan Fasilitas Kelengkapan Jalan:	%			87.6			79.61			89.13
	1. Rambu-rambu lalu lintas	buah	58	50	86.2	63	50	79.36	269	260	96.65
	2. Marka Jalan	M2	621	600	96.61	586	490	83.61	1.462	1400	95.75
	3. Pagar pengaman jalan										
	- Deliniator	btg	0	0	0	220	200	90.09	0	0	0
	- Guardrail	mtr	0	0	0	194	152	78.35	0	0	0
4. Alat pemberi isyarat lalu lintas( Warning light dan Traffic Light)	unit	10	6	80	6	4	66.66	8	6	75	
Jumlah rata-rata					92,32			86,14			87,58

Berdasarkan perbandingan realisasi dua tahun terakhir tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas

Penurunan angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2013-2015 belum bisa ditekan, hal ini bisa dilihat bahwa di tahun 2013 terjadi 132 kasus dan di tahun 2014 terjadi 137 kasus dan di tahun 2015 terjadi 139 kasus. Di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1 % dari capaian indikator di tahun 2014.

Kendala yang dihadapi sekarang yaitu masih terdapat jalan-jalan yang rusak, survey rambu-rambu yang perlu diperbaikidan yang sudah tidak dapat digunakan dan masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

2. Indikator Persentase kendaraan laik jalan

Pada tahun 2013 target 100% , terealisasi sebesar 95.36 % dengan data wajib uji sebesar 8.654 unit terealisasi sebanyak 8.253 unit, Pada tahun 2014 dengan target 100%, terealisasi sebesar 87.83% dengan data wajib uji sebesar 10.082 unit terealisasi sebanyak 8.856 unit. dan pada tahun 2015 dengan target 100% , hanya terealisasi sebesar 81.61% dengan data wajib uji sebesar 11.614 unit terealisasi sebanyak 9.407 unit, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 6.22% dari tahun 2014.

Adapun yang menjadi kendala adalah:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang wajib uji untuk menguji/kir kendaraan secara berkala.
2. Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan barang maupun angkutan penumpang.

Untuk mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut diatas, beberapa langkah terobosan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mengadakan sosialisasi kepada pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk mematuhi aturan lalu lintas dan angkutan jalan, serta melakukan pengujian kendaraannya tepat waktu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Melakukan pendataan kendaraan bermotor serta data lainnya melalui survey dan mencari sumber yang kopenten di kantor samsat, Polres Jemberana., selanjutnya dilakukan pemanggilan secara tertulis.
3. Indikator Persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan

Sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemasangan fasilitas keselamatan jalan. Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan pada tahun 2014 dimana target realisasi 87.6% turun menjadi 78.04% pada tahun 2015, , jadi Prosentase pemasangan fasilitas keselamatan jalansampai tahun 2015 sebesar 78.04% menjadi 83.97%. Tahun 2015 menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 5.93% yang disebabkan pembuatan pengadaan rambu

Kendala yang dihadapi sekarang yaitu belum maksimalnya permintaan pemasangan rambu dari unsur desa.

Keberhasilan tersebut, atas **dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang ada, baik sarana prasarana, pegawai serta koordinasi dan konsultasi berjalan harmonis dengan SKPD/instansi terkait.** Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan 3 (tiga) **program** melalui 10 (sepuluh) **kegiatan, dapat dilihat ditabel berikut:**

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
			PAGU	REALISASI	
1.1 Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Program Peningkatan pelayanan Angkutan	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	208,970,400	172,515,450	82.55%
		Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Teladan	10,062,500	9,066,000	90.10%
		Peringatan Hari Perhubungan Nasional ( HARHUBNAS )	17,872,500	16,534,000	92.56%
1.2 Persentase kendaraan laik jalan	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	25,000,000	25,000,000	100.00%
	Program Peningkatan pelayanan Angkutan	Kegiatan Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan	188,420,000	187,559,000	99.54%

1.3 Persentase pemasangan fasilitas perlengkapan jalan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	191,306,000	188,800,000	98.69%
		Pengadaan Marka Jalan	196,000,000	194,950,000	99.21%
		Pengadaan Pengendali Isyarat Lalu Lintas	180,000,000	177,000,000	98.33%
		Peningkatan Kebutuhan, Pemeliharaan dan Pengawasan Fasilitas Lalu Lintas	15,000,000	14,400,000	96.00%
	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light dan warning light	98,500,000	96,724,000	98.20%
Total rata-rata			1,131,131,400	1,082,566,450	96%

Dari tabel diatas dapat dilihat pagu anggaran sebesar **Rp. 1.131.131.400,-** dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis ini, realisasi sebesar **Rp. 1.082.566.450,-** atau **(96%)** sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar **Rp. 48.564.950,-** **(4. %)**.

**b. Tujuan II : Meningkatkan minat masyarakat pengguna angkutan penumpang umum**

Keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya minat masyarakat pengguna angkutan penumpang umum.

Untuk merealisasikan sasaran strategis meningkatnya minat masyarakat pengguna angkutan penumpang umum di Kabupaten Jembrana dalam perjanjian kinerja 2015 ditetapkan dengan 5 (lima) indikator yaitu

1. persentase loadfactor kendaraan dengan target 40 %
2. Prosentase kelengkapan terminal dengan target 100%
3. Prosentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar dengan target 97 %
4. Prosentase halte yang memadai dengan target 100%
5. Rasio ijin trayek dengan target 100 %

Capaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah **rata-rata sebesar 100 % dari target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**. Untuk lebih jelasnya capaian sasaran strategis

tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.3**  
**SASARAN MENINGKATNYA MINAT MASYARAKAT PENGGUNA**  
**ANGKUTAN PENUMPANG UMUM**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya minat masyarakat pengguna angkutan penumpang umum	2.1 persentase loadfactor kendaraan	%	30	23,2	77,33	35	21,46	61,31	40	42,18	105,45
	2.2 Prosentase kelengkapan terminal				52,8075			52,8075			52,8075
	a. Terminal Penumpang										
	- Fasilitas Utama		100	69,57	69,57	100	69,57	69,57	100	69,57	69,57
	- Fasilitas Penunjang		100	25	25	100	25	25	100	25	25
	b. Terminal Barang										
	- Fasilitas Utama		100	83,33	83,33	100	83,33	83,33	100	83,33	83,33
	- Fasilitas Penunjang		100	33,33	33,33	100	33,33	33,33	100	33,33	33,33
	2.3 Prosentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar	%	95	90,35	85	96	92,15	95,99	97	93,5	96,39
	2.4 Prosentase halte yang memadai	bua h	17	17	100	4	4	100	4	4	100
2.5 Rasio Ijin Trayek	%	100	19,76	19,76	100	23,79	23,79	100	22,58	22,58	



Total rata-rata	70,51		70,23		81,105
-----------------	-------	--	-------	--	--------

Berdasarkan perbandingan realisasi dua tahun terakhir tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator persentase loadfactor kendaraan

Yaitu jumlah kapasitas kendaraan dibagi jumlah penumpang dalam satu kendaraan tertentu. Pada tahun 2013 dengan target 30 % dengan terealisasi sebesar 23,2 %, pencapaian indikator sebesar 77,33%. Tahun 2014 dengan target 35 % dengan terealisasi sebesar 21,46 % mengalami penurunan capaian indikator menjadi 61,31 %, dan pada tahun 2015 dengan target sebesar 40% dan realisasi sebesar 42,18% dan mengalami peningkatan capaian indikator sebesar 105,45 %

Kendala yang dihadapi sekarang yaitu:

- Jumlah kendaraan atau pertumbuhan kendaraan pribadi per tahun cenderung meningkat (khususnya kendaraan roda 2) didukung kemudahan/ tawaran kredit kendaraan dari showroom,
- Waktu tunggu kendaraan angkutan umum yang lama sehingga terkesan tidak adanya kepastian waktu tempuh pelayanan angkutan umum (tidak adanya jadwal angkutan umum/time table yang pasti).
- Rata-rata usia kendaraan angkutan umum yang tersedia sudah tua (diatas 10 tahun), terkesan tidak nyaman, tidak ada kemauan peremajaan dari para pengusaha angkutan umum, sehingga mengakibatkan para pengguna jasa lebih banyak beralih ke kendaraan pribadi.

2. Indikator Prosentase kelengkapan terminal

Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Prosentase kelengkapan terminal dibagi menjadi 2 jenis yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Dari masing-masing terminal memiliki fasilitas terminal yang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Yang termasuk fasilitas utama yaitu:

- a. bangunan kantor terminal;

- b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/muat barang;
  - c. gudang atau lapangan penumpukan barang;
  - d. tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
  - e. rambu-rambu dan papan informasi;
  - f. peralatan bongkar muat barang;
- yang termasuk fasilitas penunjang yaitu:

- a. tempat istirahat awak kendaraan;
- b. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
- c. alat timbang kendaraan dan muatannya;
- d. kamar kecil/toilet;
- e. mushola;
- f. kios/kantin;
- g. ruang pengobatan;
- h. telepon umum;
- i. taman.

Selama tahun 2013-2015 dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di terminal penumpang dengan fasilitas utama dengan target 100% telah terealisasi sebesar 69,57% hal ini dikarenakan dari total fasilitas utama sebanyak 23 item yang terpenuhi sebanyak 16 item fasilitas utama. Dan fasilitas penunjang dengan target 100% telah terealisasi sebesar 25% hal ini dikarenakan dari total fasilitas penunjang sebanyak 28 item yang hanya terpenuhi sebanyak 7 item fasilitas penunjang.

Dan di terminal barang dengan fasilitas utama dengan target 100% telah terealisasi sebesar 83,33% hal ini dikarenakan dari total fasilitas utama sebanyak 6 item yang terpenuhi sebanyak 5 item fasilitas utama. Dan fasilitas penunjang dengan target 100% telah terealisasi sebesar 33,33% hal ini dikarenakan dari total fasilitas penunjang sebanyak 9 item yang hanya terpenuhi sebanyak 3 item fasilitas penunjang.

- 3. Indikator Prosentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar

Indikator Prosentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar yaitu berupa pemenuhan kelengkapan administrasi kendaraan (STNK, STUK, dan administrasi perijinan kendaraan) serta kelengkapan teknis laik jalan kendaraan angkutan umum (kondisi kendaraan yang siap operasional). Pada tahun 2013 dari pemenuhan kelengkapan administrasi kendaraan dan kelengkapan teknis laik jalan kendaraan angkutan umum dengan target 95 % dengan terealisasi sebesar 90.35 % dengan pencapaian indikator sebesar 85%, pada tahun 2014 target 96 % dengan terealisasi sebesar 92.15 % mengalami peningkatan capaian indikator menjadi 97 %, dan pada tahun 2015 dengan target sebesar 97% dan realisasi sebesar 93.5% dan mengalami peningkatan capaian indikator sebesar 96,39 %

Kendala yang dihadapi sekarang yaitu

- kurangnya kesadaran para pengusaha angkutan umum/sopir angkutan umum dalam memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis laik kendaraan tersebut.
- Penindakan pelanggaran terhadap kelengkapan administrasi dan teknis laik kendaraan cenderung masih rendah baik dalam bentuk pembinaan maupun tilang, karena besarnya denda tidak mempengaruhi efek jera terhadap para pelanggar.

#### 4. Indikator Prosentase halte yang memadai

Ditahun 2013 dengan target 17 unit terealisasi sebanyak 17 unit (100%), ditahun 2014 dengan target 4 unit dan terealisasi sebanyak 4 unit (100%), dan ditahun 2015 dengan target 4 unit dan terealisasi sebanyak 4 unit (100%), sehingga dari kebutuhan halte di Kabupaten Jembrana sebanyak 78 unit telah terpenuhi 100% (78 unit) pada tahun 2015.

#### 5. Rasio Ijin Trayek

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2013 rasio ijin trayek dengan target 100 % dengan terealisasi sebesar 19.17 % dengan pencapaian indikator sebesar 19,17%, pada tahun 2014 target 100 %

dengan terealisasi sebesar 23,79 % mengalami peningkatan capaian indikator menjadi 23,79%, dan pada tahun 2015 dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 22,58% dan mengalami penurunan capaian indikator sebesar 22,58 %. Hal ini sehubungan dengan adanya koordinasi dengan samsat dan pengujian apabila memperpanjang surat-surat cek fisik kendaraan harus semua dalam keadaan baik serta Mengadakan pembinaan bagi kendaraan yang bertrayek.

Keberhasilan tersebut, atas **dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang ada, baik sarana prasarana, pegawai serta koordinasi dan konsultasi berjalan harmonis dengan SKPD/instansi terkait.** Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan 2 (dua) **program** melalui 4 (empat) **kegiatan, dapat dilihat ditabel berikut:**

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
			PAGU	REALISASI	
2.1 persentase loadfactor kendaraan	Program Peningkatan pelayanan Angkutan	Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, tepat, Murah dan Mudah	324,832,000	296,483,000	91.27%
2.2 Prosentase kelengkapan terminal	Program Peningkatan pelayanan Angkutan	Kegiatan Penciptaan Disiplin Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	432,340,850	419,560,850	97.04%
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pembangunan gedung terminal	265,735,000	263,583,400	99.19%
		Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	192,250,000	189,200,000	98.41%
2.3 Prosentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar			-	-	-
2.4 Prosentase halte yang memadai			-	-	-
2.5 Rasio Ijin Trayek			-	-	-
Total rata-rata			1,215,157,850	1,168,827,250	96.48%

Dari tabel diatas dapat dilihat pagu anggaran sebesar **Rp. 1.215.157.850,-** dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis ini, realisasi sebesar **Rp1.168.827.250,-** atau **(96.48%)** sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar **Rp. 46.330.600,- (3.52%)**.

### c. Tujuan III : Meningkatkan kelancaran lalu lintas

Keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya kelancaran lalu lintas

Untuk merealisasikan sasaran strategis meningkatnya kelancaran lalu lintas di Kabupaten Jembrana dalam perjanjian kinerja 2015 ditetapkan dengan 1 (satu) indikator yaitu

1. Persentase tingkat kemacetan dengan target 12,6%

Capaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah **sebesar 69,84% dari target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**. Untuk lebih jelasnya capaian sasaran strategis tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.4**  
**SASARAN MENINGKATNYA KELANCARAN LALU LINTAS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kelancaran lalu lintas	3.1 Persentase tingkat kemacetan	%	10	8.5	85	11.5	8.7	75.65	12.6	8.8	69.84
Total rata-rata					85			75.65			69.84

Berdasarkan perbandingan realisasi dua tahun terakhir tersebut di atas, pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa Pada tahun 2013 Persentase tingkat kemacetan dengan target 10 % dengan terealisasi sebesar 8,5 % dengan

pencapaian indikator sebesar 85%, pada tahun 2014 target 11,5 % dengan terealisasi sebesar 8,7 % mengalami penurunan capaian indikator menjadi 75,65 %, dan pada tahun 2015 dengan target sebesar 12,6% dan realisasi sebesar 8,8% dan mengalami penurunan capaian indikator sebesar 69,84 %.

Keberhasilan tersebut, atas **dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang ada, baik sarana prasarana, pegawai serta koordinasi dan konsultasi berjalan harmonis dengan SKPD/instansi terkait.** Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan 1 (satu) **program** melalui 2 (dua) **kegiatan, dapat dilihat ditabel berikut:**

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
			PAGU	REALISASI	
3.1 Persentase tingkat kemacetan	Program Peningkatan pelayanan Angkutan	Kegiatan pengendalian dan disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	43,129,700	26,701,050	61.91%
		Kegiatan Pengumpulan dan Analisis database Pelayanan Jasa Angkutan	23,422,600	23,408,350	99.94%
Total rata-rata			66,552,300	50,109,400	80.92%

Dari tabel diatas dapat dilihat pagu anggaran sebesar **Rp. 66.552.300,-** dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis ini, realisasi sebesar **Rp. 50.109.400,-** atau **(80.92%)** sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar **Rp. 16.442.900,- (19.8%)**

#### d. Tujuan IV : Meningkatkan keterbukaan informasi publik

Keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya keterbukaan informasi publik

Untuk merealisasikan sasaran strategis meningkatnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jembrana dalam perjanjian kinerja 2015 ditetapkan dengan 1 (satu) indikator yaitu

1. Persentase Masyarakat yang terlayani informasi melalui website pemerintah daerah dengan target 167.631 orang

Situs web Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah <http://jembranakab.go.id> yang dikelola secara teknis oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sedangkan secara konten di kelola oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan dan terintegrasi dengan beberapa aplikasi.

Web ini memuat informasi mengenai kondisi terkini dari Pemerintah Kabupaten Jembrana seperti yang berkaitan dengan : sejarah, kondisi geografis, sumber daya alam, struktur pemerintahan, dan informasi lainnya berkaitan dengan pelayanan publik, pada website ini juga memberikan ruang interaksi masyarakat dengan pemerintah melalui pesan singkat hingga aktifitas pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam melakukan perbaikan untuk membangun Kabupaten Jembrana.

Kunjungan ke situs website Pemerintah Kabupaten Jembrana oleh pencari informasi pada tahun 2012 sebanyak 86.223 kali, tahun 2013 sebanyak 162.033 kali, tahun 2014 sebanyak 153.392 kali dan tahun 2015 sebanyak 288.201 kali.

Capaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah **sebesar 171,9%** dari target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Untuk lebih jelasnya capaian sasaran strategis tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut

**TABEL 3.5**  
**SASARAN MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI**  
**PUBLIK**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	4.1 Masyarakat yang terlayani informasi melalui website pemerintah	%	72.845	162.033	222	178.236	153.392	86	167.631	288.201	171.9

Total rata-rata	222		86		171.9
-----------------	-----	--	----	--	-------

Berdasarkan perbandingan realisasi dua tahun terakhir tersebut di atas, pada tahun 2015 terjadi penurunan target SKPD, pada tahun 2014 rewiu 178.236 orang, namun dalam tahun 2015 target menjadi 167.631 orang, akan tetapi pencapaian indikator tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 171.9 %. Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa Terjadi fluktuasi kunjungan, hal ini disebabkan oleh karena pengunjung yang berkunjung ke website Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak dapat diprediksi jumlahnya, hal ini disebabkan oleh semata-mata tergantung kebutuhan pengunjung untuk memperoleh informasi, meskipun informasi yang disediakan pada website sudah memadai.

Keberhasilan tersebut, atas **dukungan sumberdaya yang ada, baik sarana prasarana, pegawai (10 orang yang tergabung dalam tim) serta koordinasi dan konsultasi berjalan harmonis dengan SKPD/instansi terkait.** Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan 2 (dua) **program** melalui 4 (empat) **kegiatan, dapat dilihat ditabel berikut:**

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
			PAGU	REALISASI	
4.1 Persentase Masyarakat yang terlayani informasi melalui website pemerintah daerah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	978,966,000	855,307,050	87.37%
		Kegiatan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	19,000,000	6,227,000	32.77%
		Kegiatan Sosialisasi Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah	631,800,000	596,858,650	94.47%
	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	103,704,500	55,434,850	53.45%
Total rata-rata			1,733,470,500	1,513,827,550	67.02%



Dari tabel diatas dapat dilihat pagu sebesar **Rp.1.733.470.550,-** dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis ini, realisasi sebesar **Rp. 1.513.827.550,-** atau **(67.02%)**. sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar Rp. **Rp. 219.642.950,- (32.98%)**. Hal ini dikarenakan Tidak terlaksananya anggaran belanja system informasi Retribusi menara Telekomunikasi dan router pada kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan adanya keputusan MK No.48/PPU-XXII/2014 tgl 26 Mei 2015 yang mana Pemerintah sedang dalam proses penyusunan rancangan peraturan Menteri tentang pedoman umum perhitungan tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut dari keputusan MK tersebut

- Kendala yang dihadapi, setiap tahun atau sesuai kebutuhan masih saja ada SKPD yang belum melakukan update data sampai batas waktu update data dan informasi yang telah ditentukan berakhir.
- Langkah yang dilakukan setiap awal tahun para SKPD telah diberikan surat untuk melakukan update data dan apabila tidak dilaksanakan juga telah di berikan surat peringatan bagi yang belum melakukan update data.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan pada website sebagai salah satu saran informasi beberapa kiat yang akan dilakukan agar tercapainya target RPJMD 2016 antara lain adalah :

- a. Menambah jumlah konten.
- b. Meningkatkan kualitas isi konten.
- c. Melakukan update data dan informasi tepat waktu dan sesuai kebutuhan

**e. Tujuan V : Meningkatkan ketersediaan aplikasi pelayanan publik**

Keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya ketersediaan aplikasi pelayanan publik

Untuk merealisasikan sasaran strategis meningkatnya ketersediaan aplikasi pelayanan publik di Kabupaten Jembrana dalam perjanjian kinerja 2015 ditetapkan dengan 1 (satu) indikator yaitu

1. Persentase sistem informasi pelayanan publik dengan target 100%

Capaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah **sebesar 100% dari target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**. Untuk lebih jelasnya capaian sasaran strategis tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.6**  
**SASARAN MENINGKATNYA KETERSEDIAAN APLIKASI**  
**PELAYANAN PUBLIK**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Tar get	Realis asi	%	targ et	Realis asi	%	targ et	Realis asi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya ketersediaan aplikasi pelayanan publik	5.1 Persentase sistem informasi pelayanan publik	%	2	2	100	1	1	100	-	-	-
			kaji an	kaji an		kaji an	kaji an		-	-	-
			1	1	100	1	-	0	1	1	100
			apli kasi	aplik asi		aplik asi	-		aplik asi	aplika si	
Total rata-rata					100%			50%			100%

Berdasarkan perbandingan realisasi dua tahun terakhir tersebut di atas, pada tahun 2015 menargetkan 1 kajian dan terealisasi 1 kajian rencana induk integrasi system TIK daerah. Pada tahun 2014 dengan target 1 aplikasi dan 1 kajian, hanya terealisasi 1 kajian TIK Daerah yaitu warehouse, hal ini dikarenakan adanya keputusan MK mengenai Menara Tower Telekomunikasi dan pada tahun 2013 dengan target 2 kajian dan 1 aplikasi terealisasi 2 kajian yaitu kajian TIK jembrana dan kajian Naskah akademis pembentukan lembaga penyiaran publik local radio publik kabupaten jembrana. dan 1 aplikasi yaitu aplikasi SINDAMENTEL.

Keberhasilan tersebut, atas **dukungan sumberdaya yang ada, baik sarana prasarana, pegawai (10 orang yang tergabung dalam**

tim) serta koordinasi dan konsultasi berjalan harmonis dengan SKPD/instansi terkait. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan 1 (satu) program melalui 1 (satu) kegiatan, dapat dilihat ditabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
			PAGU	REALISASI	
5.1 Persentase sistem informasi pelayanan publik daerah	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	50,000,000	49,439,900	98.88%
Total rata-rata			50,000,000	49,439,900	98.88%

Dari tabel diatas dapat dilihat pagu anggaran sebesar **Rp. 50.000.000,-** dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis ini, realisasi sebesar **Rp. 49.439.900,- atau (99%)** sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar **Rp.560.100,-(1.12%)**.

### 3.2 ASPEK KEUANGAN

#### a. Realisasi Keuangan Tahun 2014

Untuk mencapai Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahun kedepan ditetapkan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 Di dalam Tahun 2014 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan APBD Kabupaten Jembrana terdapat dukungan dana sejumlah Rp. 10.306.987.050,- yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.4.395.456.900,- dan alokasi belanja langsung sebesar Rp.5.911.530.000,-. Dengan Realisasi capaian belanja tidak langsung Rp. 3.987.418.004 (90.72%), dan Realisasi capaian belanja langsung Rp. 5.248.895.214 (88.79%).

#### b. Realisasi Keuangan Tahun 2015

Untuk mencapai Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahun kedepan ditetapkan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 Di dalam Tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan APBD Kabupaten Jembrana terdapat dukungan dana sejumlah Rp. 9.613.669.150,- yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.4.564.784.500,- dan alokasi belanja langsung sebesar Rp.5.048.884.650,-. Dengan Realisasi capaian belanja tidak langsung Rp. 4.359.097.060 (95.5%), dan Realisasi capaian belanja langsung Rp. 4.503.585.020 (89.19%).

**TABEL 3.7**  
**DATA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2015**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Fisik (%)	Keu (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	803.763.600	<b>100%</b>	593.002.470	<b>74%</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000	100%	5.444.000	97%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	271.212.500	100%	156.559.470	58%
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	39.700.000	100%	12.950.000	33%
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.000.800	100%	79.557.350	99%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.613.300	100%	21.942.700	69%
	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	76.500.000	100%	74.830.000	98%
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	23.695.000	100%	8.653.250	37%
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	252.342.000	100%	212.865.700	84%
	- Penyediaan upacara/upacara keagamaan	23.100.000	100%	20.200.000	87%
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	22.793.000	<b>100%</b>	22.143.000	<b>97%</b>
	- Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional				
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.793.000	100%		100%
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional				
	- Pengadaan Mebeleur	20.000.000	100%		97%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	14.000.000	100%	14.000.000	100%
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	14.000.000	100%	14.000.000	100%
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	12.016.000	100%	9.687.000	81%
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.016.000	100%	9.687.000	81%
<b>5</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>				
	-Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan				
<b>6</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	123.500.000	<b>100%</b>	121.724.000	<b>99%</b>
	- Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor				
	- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	25.000.000	100%	25.000.000	100%
	- Rehabilitasi Pemeliharaan Halte				
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light	98.500.000	100%	96.724.000	98%
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	1.249.050.550	100%	1.151.827.700	98.36%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Fisik (%)	Keu (Rp)	%
	- Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	43.129.700	100%	26.701.050	65.00%
	- Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Di Lingkungan Terminal	432.340.850	100%	419.560.850	100%
	- Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	324.832.000	100%	296.483.000	99.91%
	- Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan	23.422.600	100%	23.408.350	95.00%
	- Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	188.420.000	100%	187.559.000	98.41%
	- Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	208.970.400	100%	172.515.450	99.42%
	- Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Teladan	10.062.500	100%	9.066.000	97.00%
	-Peringatan Hari Perhubungan Nasional ( HARHUBNAS )	17.872.500	100%	16.534.000	93%
<b>8</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	457.985.000	100%	452.783.400	99%
	- Pembangunan gedung terminal	265.735.000	100%	263.583.400	99%
	- Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal	192.250.000	100%	189.200.000	98%
<b>9</b>	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	582.306.000	100%	575.150.000	100%
	- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	191.306.000	100%	188.800.000	98%
	- Pengadaan Marka Jalan	196.000.000	100%	194.950.000	99%
	- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan				
	- Pengadaan pengendali isyarat Lalu lintas	180.000.000	100%	177.000.000	98%
	- Peningkatan Kebutuhan, pemeliharaan, dan pengwasan fasilitas lalu lintas	15.000.000	100%	14.400.000	96%
10	<b>Program Peningkatan Kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	1.629.766.000	100%	1.458.392.700	91%
	- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	978.966.000	100%	855.307.050	87%
	- Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	19.000.000	100%	6.227.000	33%
	- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan Informasi				
	- Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah	631.800.000	100%	596.858.650	98%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Fisik (%)	Keu (Rp)	%
12	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	50.000.000	100%	49.439.900	98%
	- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	50.000.000	100%	49.439.900	98%
13	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	103.704.500	<b>100%</b>	55.434.850	53%
	- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	103.704.500	<b>100%</b>	55.434.850	53%
	<b>TOTAL</b>	5.048.884.650	<b>89,19%</b>	4.503.585.020	<b>89,19%</b>

Dalam Tahun 2015 jumlah dana yang dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana (sesuai dengan DPA yang disetujui) sebesar Rp. 9.613.669.150 yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.564.784.500 dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.048.884.650 terdiri dari 11 program :

1. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran Rp. 803.763.600
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.22.793.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 14.000.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 12.016.000
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 123.500.000
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 1.249.050.550
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp 457.985.000
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp582.306.000
9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp 1.629.766.000
10. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Rp 50.000.000
11. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Rp 103.704.500

**TABEL 3.8**  
**CAPAIAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA**  
**TAHUN 2015 DAN TAHUN SEBELUMNYA (2014)**

No	Kegiatan	Target (Rp) 2014	Target (Rp) 2015	Realisasi 2014			Realisasi 2015			Ket
				Rp.	% Keu	% Fisik	Rp.	% Keu	% Fisik	
I. Pendapatan										
	Pendapatan Asli Daerah	925.642.689	966.694.681	817.400.386	88.31	88.31	880.200.136	91,05%	91,05%	
II. Belanja SKPD										
1	Belanja Tidak Langsung	4.395.456.900	4.564.784.500	3.987.418.004	90.72%	90.72%	4.359.097.060	95,5%	95,5%	
	- Belanja pegawai	4.395.456.900	4.564.784.500	3.987.418.004	90.72%	90.72%	4.359.097.060	95,5%	95,5%	
2	Belanja Langsung	5.911.530.150	5.048.884.650	5.248.895.214	88.79%	88.79%	4.503.585.020	89,19%	89,19%	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	718.951.150	803.763.600	568.414.064	79.06	79.06%	593.002.470	74%		
	- Penyediaan jasa surat menyurat	5.600.000	5.600.000	4.713.500	84.17%	84.00%	5.444.000	97%	100%	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	202.806.000	271.212.500	169.710.250	83.68%	84.00%	156.559.470	58%	100%	
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.700.000	39.700.000	11.150.000	33.09%	33.00%	12.950.000	33%	100%	
	- Penyediaan alat tulis kantor	98.040.250	80.000.800	97.628.950	99.58%	99.58%	79.557.350	99%	100%	



	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.974.900	31.613.300	21.249.400	88.63%	88.63%	21.942.700	69%	100%	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.500.000	76.500.000	11.425.000	73.71%	73.71%	74.830.000	98%	100%	
	- Penyediaan makanan dan minuman	18.672.000	23.695.000	10.712.000	57,37%	57,37%	8.653.250	37%	100%	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	297.558.000	252.342.000	218.724.964	73.51%	73.51%	212.865.700	84%	100%	
	- Penyediaan upacara/upacara keagamaan	23.100.000	23.100.000	23.100.000	100%	100%	20.200.000	87%	100%	
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39.197.500	22.793.000	30.028.500	77.00%	77.00%	22.143.000	97%	100%	
	- Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	17.000.000	-	16.400.000	96.00%	96.00%	-	-	-	
	- Pengadaan Mebeleur	19.750.000	20.000.000	11.250.000	57.00%	57.00%	19.350.000	97%	100%	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.447.500	2.793.000	2.378.500	97.00%	97.00%	2.793.000	100%	100%	

c.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.000.000	14.000.000	14.000.000	100%	100%	14.000.000	100%	100%	
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	14.000.000	14.000.000	14.000.000	100%	100%	14.000.000	100%	100%	
d.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.826.000	12.016.000	9.360.000	79.15%	79.15%	9.687.000	81%	100%	
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.826.000	12.016.000	9.360.000	79.15%	79.15%	9.687.000	81%	100%	
e.	Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas perhubungan	225.000.000	-	179.657.000	80.00%	80.00%	-	-	-	
	- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	255.000.000	-	179.657.000	80.00%	80.00%	-	-	-	
f.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	212.250.000	123.500.000	209.634.000	99.00%	99.00%	121.724.000	99%	100%	
	- Rehabilitasi /pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	20.936.000	-	20.900.000	100%	100%	-	-	-	
	- Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	-	25.000.000				25.000.000	100%	100%	

	- Rehabilitasi /pemeliharaan terminal/pelabuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rehabilitasi/pemeliharaan halte	10.000.000	-	10.000.000	100%	100%	-	-	-	-
	- Rehabilitasi / pemeliharaan traffic light dan warning light	181.314.000	98.500.000	178.734.000	99.00%	99.00%	96.724.000	98%	100%	
g.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	902.421.700	1.249.050.550	887.585.250	98.36%	98.36%	1.151.827.700	92%	100%	
	- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Jalan Raya	26.265.000	43.129.700	17.165.000	65.00%	65.00%	26.701.050	62%	100%	
	- Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	407.892.250	432.340.850	407.892.250	100%	100%	419.560.850	97%	100%	
	- Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	156.636.500	324.832.000	156.501.000	99.91%	99.91%	296.483.000	91%	100%	
	- Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan	9.710.950	23.422.600	9.227.000	95.00%	95.00%	23.408.350	100%	100%	
	- Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	124.820.000	188.420.000	122.839.500	98.41%	98.41%	187.559.000	100%	100%	
	- Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	132.609.000	208.970.400	131.842.500	99.42%	99.42%	172.515.450	83%	100%	

	- Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan teladan	34.638.000	10.062.500	33.658.000	97.00%	97.00%	9.066.000	90%	100%	
	- Peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)	9.850.000	17.872.500	8.460.000	86.00%	86.00%	16.543.000	93%	100%	
h.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	192.000.000	457.985.000	190.920.000	99.00%	99.00%	452.783.400	99%	100%	
	- Pembangunan Gedung Terminal	-	265.735.000				263.583.400	99%	100%	
	- Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal	192.000.000	192.250.000	190.920.000	99.00%	99.00%	189.200.000	98%	100%	
i.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	587.337.500	582.306.000	580.281.500	99%	100%	575.150.000	100%	100%	
	- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	201.851.500	191.306.000	198.101.500	98.00%	100%	188.800.000		100%	
	- Pengadaan marka jalan	103.600.000	196.000.000	102.860.000	99%	100%	194.450.000	99%	100%	
	- Pengadaan pagar pengaman jalan	197.600.000	-	195.320.000	98.84%	100%	-	-	-	
	- Pengadaan Pengendali Isyarat Lalu Lintas	84.286.000	180.000.000	84.000.000	99.66%	100%	177.000.000	98%	100%	

	- Peningkatan Kebutuhan, pemeliharaan, dan pengwasan fasilitas lalu lintas	-	15.000.000				14.400.000	96%	100%	
j.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-		-	-	-	
	- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	-		-	-	-	
k.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.865.711.400	1.629.766.000	2.474.291.900	86.34%	86%	1.458.392.700	91%	100%	
	- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	790.714.400	978.966.000	530.538.800	67.10%	67%	855.307.050	87%	100%	
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	30.000.000	19.000.000	7.362.000	25%	100%	6.227.000	33%	100%	
	- Pengadaan alat studio dan komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	83.000.000	-	81.812.000	99%	100%	-	-	-	
	- Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah	1.961.997.000	631.800.000	1.854.579.100	94.53%	94.53%	596.858.650	98%	100%	

I.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	25.000.000	50.000.000	25.000.000	100%	100%	49.439.900	98%	100%	
	- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	25.000.000	50.000.000	25.000.000	100%	100%	49.439.900	98%	100%	
m.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	117.834.900	103.704.500	79.723.000	67.66%	68%	55.434.850	53%	100%	
	- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	117.834.900	103.704.500	79.723.000	67.66%	68%	55.434.850	53%	100%	
	<b>Total</b>	<b>5.911.530.150</b>	<b>5.048.884.650</b>	<b>5.248.895.214</b>	<b>88.79</b>	<b>88.79</b>	<b>4.503.585.020</b>	<b>90%</b>	<b>98%</b>	

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah sebesar Rp. 9.613.669.150 yang terdiri dari target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.564.784.500 dan target Belanja Langsung sebesar Rp.5.048.884.650

Untuk Belanja Langsung terealisasi Rp. 4.503.585.020 (89.19%), sedangkan Belanja Tidak Langsung teralisasi Rp. 4.359.097.060 (95.5%), Walaupun realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja langsung hanya 90%, namun secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sudah bisa terlaksana dengan fisiknya 98%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2014 sebesar 88.79%, pada Tahun Anggaran 2015 terjadi kenaikan menjadi 89.19% sekitar (0.4%)

Realisasi belanja tahun 2015 sebesar yang terbagi dalam dua jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.359.097.060, sisa dana sebesar Rp 205.687.440,- dengan persentase realisasi sebesar 95,49 % dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.503.585.020,-, sisa dana Rp 545.299.630,- dengan persentase realisasi sebesar 89,19%. Total realisasi belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 8.862.682.080,- (92,19%). Sehingga terjadi efisiensi Sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 750.987.070,- (7,81%).

Keberhasilan pencapaian sasaran dan target atas pelaksanaan program / kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah:

1. Adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap pegawai terhadap tugas dan tanggungjawabnya.
2. Adanya standar prosedur operasional sebagai acuan kerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
2. Adanya situasi yang kondusif untuk menjaga etos kerja
3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
4. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

Adanya kegiatan yang capaiannya tidak memenuhi target dikarenakan :

1. Tidak terlaksananya anggaran belanja system informasi Retribusi menara Telekomunikasi dan router pada kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan adanya keputusan MK No.48/PPU-XXII/2014 tgl 26 Mei 2015 yang mana Pemerintah sedang dalam proses penyusunan rancangan peraturan Menteri tentang pedoman umum perhitungan tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut dari keputusan MK tersebut.

### **3.3 PRESTASI ATAU PENGHARGAAN**

Untuk tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mendapatkan Penghargaan/Prestasi sebagai berikut:

1. Mendapatkan sertifikat Plakat WTN ( Wahana Tata Nugraha) dengan kategori lalu lintas pada kota kecil sebagaimana tercapainya ketertiban dalam berlalu lintas.
2. Mendapatkan Piala dalam lomba AKUT ( Awak Kendaraan Umum Teladan), dalam rangka lomba angkutan teladan Juara III Tingkat Propinsi.
3. Mendapatkan Peringkat IV dalam Pemeringkatan E-Goverment Tingkat kabupaten/ Kota untuk Wilayah Banten,DIY,Bali,NTB,Kalimantan, Sulawesi tahun 2015

Dengan adanya Prestasi/penghargaan yang telah dicapai, maka diharapkan adanya peningkatan ketertiban dan pelayanan dibidang angkutan serta peningkatan kinerja berbasis IT dalam bidang Komunikasi dan Informatika.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Good Governance Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.
- b. Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana secara fisik 89.19% dimana data ini adalah kegiatan dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.
- c. Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Inspektorat Kabupaten Jembrana didukung dana sejumlah Rp.9.613.669.150 yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.564.784.500 dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.048.884.650
- d. Dari Analisa Keuangan tersebut nampak Inspektorat Kabupaten Jembrana telah mengacu pada gerakan efisiensi, dimana fisik dapat diselesaikan rata-rata 100% keuangan realisasi 89.19 %
- e. Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.

### 4.2 Saran

Dengan peningkatankualitas SDM Aparatur pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan didalam pelayanan kepada masyarakat dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah Daerah di mata masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini dapat tersusun, semoga bermanfaat sebagaimana diharapkan. Berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi

pencapaian sasaran, kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana belum semua sasaran dapat tercapai namun terhadap beberapa sasaran telah dapat tercapai. Saran dan kritik yang produktif sangat kami perlukan demi kesempurnaan penyusunan maupun pelaksanaan kinerja yang lebih akuntabel di masa mendatang.

Negara, 24 Mei 2016

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi  
Dan Informatika Kabupaten Jembrana

**I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, SH., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640506 199403 1 010